

## PENAMPILAN TIM AEROBATIK AFSEL

Pesawat dari tim aerobatik Afrika Selatan meninggalkan jejak asap saat tampil di atas Paviliun Tengwang di pusat kota Nanchang, Provinsi Jiangxi, Tiongkok, Rabu (23/11).

XINHUA



# Arab Saudi Eksekusi Mati 144 Orang Selama 2022

PBB mengecam Arab Saudi atas eksekusi mati yang dilakukan hampir setiap hari selama beberapa pekan terakhir.

**RIYAD (IM)** – Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengecam Arab Saudi atas eksekusi mati yang dilakukan hampir setiap hari selama beberapa pekan terakhir. Arab Saudi juga mengakhiri moratorium selama 21 bulan atas penerapan hukum mati untuk kejahatan narkoba.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengumumkan, 17 pria telah dieksekusi karena pelanggaran narkoba dan barang selundupan di seluruh Arab Saudi sejak 10

November. Tiga eksekusi terakhir juga terjadi sehari sebelumnya.

“Mereka yang dieksekusi hingga saat ini adalah empat warga Suriah, tiga warga Pakistan, tiga warga Yordania, dan tujuh warga Arab Saudi,” kata juru bicara OHCHR Liz Throssell kepada wartawan di Jenewa, seperti dilansir Fars News, Kamis (24/11).

Throssell mengatakan jumlah total eksekusi di Arab Saudi tahun ini mencapai 144 orang, termasuk 47 orang yang dieksekusi atas tuduhan politik dan 56 orang yang

dieksekusi karena pembunuhan.

Sebagian besar eksekusi di negara itu diyakini dilakukan dengan pemenggalan kepala. Throssell menekankan bahwa eksekusi telah berlangsung hampir setiap hari selama dua pekan terakhir, menyusul berakhirnya moratorium resmi selama 21 bulan.

Dia menuturkannya, dimulainya kembali eksekusi untuk pelanggaran terkait narkoba di Arab Saudi adalah langkah yang sangat disesalkan. “Apalagi terjadi hanya beberapa hari setelah sebagian besar negara di Majelis Umum PBB menyerukan moratorium hukuman mati di seluruh dunia,” katanya yang menambahkan bahwa menjatuhkan hukuman mati untuk pelanggaran narkoba tidak sesuai dengan norma dan standar internasional.

PBB menyerukan kepada otoritas Arab Saudi untuk mengadopsi moratorium formal pada eksekusi untuk pelanggaran terkait narkoba, untuk meringankan hukuman mati pada kejahatan narkoba.

Juga memastikan hak atas pengadilan yang adil bagi semua terdakwa, termasuk mereka yang didakwa dengan pelanggaran tersebut, agar sejalan dengan kewajiban internasionalnya. OHCHR mengatakan masih belum jelas berapa banyak orang yang terpidana mati di Arab Saudi karena eksekusi hanya dikonfirmasi setelah dilakukan.

Throssell kemudian menyebutkan adanya laporan seorang pria Yordania, yang diidentifikasi sebagai Hussein Abo Al-Kheir, yang kemungkinan berisiko dieksekusi dalam waktu dekat.

Sejak Putra Mahkota Mohammed bin Salman menjadi pemimpin de facto Arab Saudi pada 2017, kerajaan tersebut telah menangkap ratusan aktivis, blogger, intelektual, dan lainnya karena aktivisme politik mereka. Ini menunjukkan toleransi yang hampir nol terhadap perbedaan pendapat bahkan dalam menghadapi kecaman internasional atas tindakan keras tersebut.

Cendekiawan Muslim telah dieksekusi dan aktivis hak-hak perempuan telah ditempatkan di balik jeruji besi dan disiksa karena kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkeyakinan terus ditolak oleh otoritas kerajaan. Selama beberapa tahun terakhir, Riyadh juga telah mendefinisikan kembali undang-undang anti-terorismenya untuk menargetkan aktivisme. ● tom

## Korea Utara Tuding AS Seret Kawasan Korea ke Dalam Krisis Keamanan

**ANKARA (IM)** - Korea Utara menuduh Amerika Serikat (AS) mendorong kawasan Semenanjung Korea ke dalam krisis keamanan dan mengatakan semua upaya Washington untuk melucuti senjata Pyongyang akan mengalami kegagalan.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Selasa malam, Kim Yo Jong, wakil direktur departemen Komite Sentral Partai Buruh

Korea, mengecam AS karena meminta Dewan Keamanan PBB untuk membatasi “senjata ilegal” Korea Utara.

“DK PBB telah menutup mata terhadap latihan militer yang sangat berbahaya dari AS dan Korea Selatan dan penumpukan senjata rakus mereka yang diperlihatkan kepada Korea Utara dan memperlakukan pelaksanaan Korea Utara atas haknya yang tidak dapat diganggu gugat untuk membela diri yang sesuai dengan

mereka. Ini jelas merupakan penerapan standar ganda,” kata Kim dalam pernyataan yang diterbitkan oleh Kantor Berita Pusat Korea milik pemerintah.

“Ironi besar bahwa segera setelah pertemuan pembukaan DK PBB selesai, AS melampirkan kemarahannya atas kegagalan dalam mewujudkan niat jahatnya sambil mempublikasikan ‘pernyataan bersama’ yang menjijikkan bersama dengan rakyat jelata seperti Inggris, Prancis, Australia, Jepang,

dan [Korea] Selatan. Korea, tidak menyembunyikan suasana hatinya yang buruk,” tambah Kim.

Pada Senin, AS meminta Dewan Keamanan PBB untuk menuliskan “tindakan keras” terhadap Korea Utara sebagai tanggapan atas peluncuran rudal balistik antarbenau terbaru Pyongyang, yang melanggar resolusi PBB.

Kim menolak reaksi dari AS dan sekutunya atas uji coba rudal terbaru Pyongyang dan mengatakan Washington men-

dorong situasi semenanjung Korea ke fase krisis baru.

“AS harus berhati-hati bahwa tidak peduli seberapa keras upayanya untuk melucuti senjata Korut, AS tidak akan pernah dapat menghilangkan hak Korut untuk membela diri dan semakin bersikeras pada tindakan anti-Korea Utara, Korea akan menghadapi krisis keamanan yang lebih fatal,” pungkash Kim. ● ans

## AS Jatuhkan Sanksi ke Tiga Pejabat Iran Buntut Unjuk Rasa

**WASHINGTON (IM)** - Amerika Serikat (AS) mengumumkan sanksi terhadap tiga pejabat keamanan Iran terkait tindakan keras terhadap pengunjuk rasa di Iran. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menuduh Hassan Asgari, Alireza Moradi dan Mohammad Taghi Osanloo terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

“AS sangat prihatin dengan laporan bahwa pihak berwenang Iran meningkatkan kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai,” kata Blinken seperti dikutip laman Aljazeera, Kamis (24/11). “Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Iran pada rakyatnya tidak boleh dibiarkan begitu saja,” ujarnya menambahkan.

Pengumuman sanksi dilayangkan ketika aksi protes massa terus menguncang Iran. Protes dipicu oleh kematian Mahsa Amini (22 tahun) seorang wanita Iran keturunan Kurdi yang meninggal setelah ditahan oleh polisi moral negara itu pada September. Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di Iran, sebuah kelompok yang memantau protes, mencatat setidaknya 426 orang telah tewas dan lebih dari 17.400 ditangkap dalam upaya pemerintah Iran menghentikan protes.

Departemen Keuangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tanggapan pemerintah sangat parah di daerah-daerah dengan populasi Kurdi yang besar, seperti Sanandaj dan Mahabad di barat laut Iran. Salah satu individu yang dikenai sanksi hari ini, Asgari, adalah gubernur Sanandaj.

Departemen Keuangan AS menuduh bahwa dia dan pejabat lainnya berusaha menutupi kematian seorang pengunjuk rasa berusia 16 tahun yang

dilaporkan dibunuh oleh pasukan keamanan. Pihaknya menyebarkan desas-desus bahwa remaja itu meninggal karena bunuh diri dan overdosis obat.

“Pejabat lain yang terkena sanksi adalah Moradi, seorang komandan Pasukan Penegakan Hukum Iran (LEF) Sanandaj karena memerintahkan penangkapan massal para pengunjuk rasa,” kata Blinken.

Orang ketiga yang disebutkan dalam sanksi Rabu (23/11) adalah Osanloo. Ia adalah komandan unit pasukan darat Korps Revolusi Islam (IRGC) di provinsi Azerbaijan Barat Iran. Dia mengawasi wilayah yang mencakup kota Kurdi di Mahabad.

Sanksi tersebut membekukan aset berbasis AS yang dimiliki oleh individu dan umumnya melarang orang di AS untuk terlibat dalam urusan bisnis dengan mereka. AS sebelumnya telah menjatuhkan sanksi pada anggota badan intelijen Iran, pemimpin IRGC, sipir penjara, anggota media pemerintah Iran dan lainnya.

“Rezim Iran dilaporkan menargetkan dan menembak mati anak-anaknya sendiri, yang telah turun ke jalan untuk menuntut masa depan yang lebih baik,” kata wakil menteri keuangan untuk terorisme dan intelijen keuangan, Brian Nelson.

“Pelanggaran yang dilakukan di Iran terhadap pengunjuk rasa, termasuk yang terbaru di Mahabad, harus dihentikan,” imbuhnya.

Iran telah menolak pemeriksaan catatan hak asasi manusianya. Teheran malah menuduh pemerintah Barat munafik dan menyatakan selama pertemuan PBB bahwa pemerintah telah menunjukkan pengekangan selama protes. ● gul

## Anwar Ibrahim Dipastikan Segera Jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia

**KUALA LUMPUR (IM)** - Pemimpin Utama Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim dipastikan segera menjadi Perdana Menteri (PM) ke-10 Malaysia. Kondisi itu dipastikan setelah UMNO yang merupakan elemen partai terbesar di Koalisi Barisan Nasional, menyatakan bersedia bergabung dan mendukung koalisi yang dipimpin mantan PM tersebut.

Pemerintah Malaysia pada Sabtu (19/11), telah menyelenggarakan pemilihan umum, yang hasilnya koalisi Pakatan Harapan (PH) menjadi pemenang dengan meraih 82 kursi parlemen.

Disusul koalisi Perikatan Nasional (PN) dengan 73 kursi, koalisi Barisan Nasional (BN) 30 kursi, koalisi Gabungan Partai Serawak (GPS) 23 kursi, koalisi Gerakan Rakyat Sabah (GRS) enam kursi, Warisan tiga kursi, independen dua kursi, serta KDM dan PBM masing-masing satu kursi.

Meskipun Pakatan Harapan memiliki kursi terbanyak, namun Anwar tidak otomatis dilantik sebagai

PM. Hal tersebut dikarenakan syarat untuk membentuk kabinet pemerintahan adalah partai/koalisi atau gabungan partai/koalisi bisa meraih lebih 50 persen kursi parlemen atau memiliki 112 kursi dari 222 jumlah keseluruhan kursi parlemen.

Sekjen UMNO, Ahmad Maslan dalam keterangannya kepada media setelah Musyawarah Majelis Kerja Tertinggi (MKT) khas Partai yang berlangsung sengit mengatakan, partainya sepakat menjadi bagian dari pemerintahan gabungan sesuai Titah dari Raja. Namun mereka menyatakan tidak bersedia jika harus bergabung dengan koalisi Perikatan Nasional.

“MKT sepakat satu suara memutuskan untuk mendukung dan menjunjung titah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong supaya BN mendukung dan mengambil bagian dalam pemerintahan gabungan yang bukan dipimpin oleh PN untuk memastikan sebuah pemerintahan yang stabil dan makmur dapat dibentuk,” kata Ahmad pada

Kamis dini hari waktu setempat.

Ahmad menuturkan, KT UMNO juga bersepakat semua kader partai yang memperoleh kursi parlemen pada Pemilu lalu mematuhi dan menerima pemerintahan gabungan atau bentuk pemerintahan lainnya yang bakal dibentuk oleh Raja.

Sebelumnya pada Rabu (23/11) kemarin saat menghadap Raja, Pemimpin Utama Barisan Nasional yang juga Pemimpin UMNO, Ahmad Zahid Hamidi telah memberikan surat kepada Raja. Dalam surat tersebut menyatakan 30 anggota parlemen BN yang baru terpilih memberikan dukungan kepada PH untuk membentuk pemerintahan dan mendukung Anwar menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia.

Sebagai informasi siang ini, para Raja-raja Negeri akan berkumpul di Istana Negara untuk melakukan musyawarah khusus membahas permasalahan dan menentukan solusi terbaik penyelesaian kondisi politik di Malaysia ini. ● tom



KERETA KARGO TIONGKOK - EUROPA

Kereta kargo Tiongkok-Eropa No. X8151 bersiap berangkat dari Pelabuhan Internasional Xi'an di Xi'an, Provinsi Shaanxi, Tiongkok, Rabu (23/11). Mengangkut produk peralatan rumah tangga, kereta tersebut berangkat dari Xi'an menuju Eropa pada Rabu (23/11), menandai perjalanan ke-4.000 kereta kargo Tiongkok-Eropa yang diberangkatkan dari Shaanxi pada 2022.

## Kim Yo-jong Sebut Pemerintahan Yoon Idiot

**PYONGYANG (IM)** - Korea Utara (Korut) pada Kamis (24/11) mengecam seruan Korea Selatan (Korsel) untuk menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Pyongyang yang menyusul peluncuran misilnya. Kakak perempuan pemimpin Korut Kim Yo-jong menyebut Presiden Korsel Yoon Suk-yeol dan pemerintahannya “idiot” karena patuh pada Amerika Serikat (AS).

Adik Kim Jong-un itu membuat pernyataan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh media Korut, Korean Central News Agency (KCNA). Ia juga memperingatkan bahwa sanksi dan tekanan justru akan menambah permusuhan dan kemarahan Korut.

“Jika mereka berpikir bahwa mereka dapat melarikan diri dari situasi berbahaya saat ini melalui ‘sanksi’, mereka pasti benar-benar idiot karena mereka tidak tahu bagaimana hidup dalam damai dan nyaman,” kata Kim Yo-jong dalam pernyataannya. Ia menyebut Yoon dan pemerintahannya seekor “anjing liar yang berlari” dengan tulang yang diberikan oleh AS.

Kementerian unifikasi Korsel mengeluarkan pernyataan atas komentar menyedihkan yang menargetkan pemimpin Yoon. “Kami menyatakan penyesalan yang kuat atas sikap (Korut) yang mencoba mengalihkan kesalahan pada kami ketika

ketegangan saat ini di Semenanjung Korea disebabkan oleh provokasi rudal berulang Korea Utara,” kata kementerian itu dalam pernyataan itu.

Kementerian luar negeri Korsel mengatakan pada Selasa bahwa pihaknya sedang meninjau sanksi independen terhadap Pyongyang. Dikatakan sanksi pada sektor siber termasuk di antara yang dipertimbangkan jika Korut terus menerus melakukan uji coba, bahkan mendorong maju dengan uji coba nuklir.

Korut telah melakukan peluncuran rudal balistik dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya tahun ini. Selama berbulan-bulan Washington mengatakan Korut bisa saja melakukan uji coba bom nuklir, yang pertama sejak 2017, kapan saja.

AS telah mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk meminta pertanggungjawaban Korut atas uji coba misilnya dalam satu suara, karena badan 15-anggota telah terpecah tentang bagaimana menangani Pyongyang dalam beberapa tahun terakhir.

Meskipun Tiongkok dan Rusia mendukung sanksi yang lebih ketat setelah uji coba nuklir terakhir Pyongyang pada 2017, pada bulan Mei mereka memveto dorongan pimpinan AS untuk lebih banyak hukuman PBB atas peluncuran rudal barunya. ● gul

## Portugal Tangkap 35 Pelaku Perdagangan Manusia

**LISBON (IM)** - Polisi Portugal menyatakan pada Kamis (24/11), sebanyak 35 orang yang diduga terlibat dalam perdagangan manusia telah ditangkap. Peringkusan tersebut berhasil dilakukan dalam operasi besar-besaran yang mengerahkan sekitar 400 petugas di wilayah Alentejo selatan Portugal.

Kantor polisi kriminal PJ dalam sebuah pernyataan mengumumkan, sebanyak 65 pengerebekan dilakukan, menghasilkan penangkapan terhadap tersangka anggota jaringan perdagangan manusia yang secara ilegal membawa migran untuk bekerja di pertanian Alentejo.

Pada tersangka berusia 22 hingga 58 tahun adalah warga negara Portugis dan asing, sedangkan para korban berasal dari negara-negara termasuk Rumania, Moldova, India, Senegal, Pakistan, Maroko, dan Aljazair.

Operasi tersebut awalnya dilaporkan oleh CNN Portugal dan kemudian dikonfirmasi oleh polisi.

“Para tersangka didakwa berat atas kejahatan asosiasi kriminal, perdagangan manusia, pencucian uang, pemalsuan dokumen, dan lainnya,” kata polisi.

Jaksa penuntut umum mengkonfirmasi penggerebekan tersebut tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut karena penyelidikan berada di bawah kerahasiaan yudisial.

Para penyelidik Portugal sebelumnya mengatakan, korban biasanya adalah migran miskin yang dibawa ke Portugal oleh kelompok penyelundup manusia dengan janji pekerjaan.

Tapi, setelah mereka mulai bekerja, dokumen identitas sering kali disita dan gajinya ditahan. Banyak migran pekerja itu pun dimasukkan ke dalam tempat tinggal umum yang suram dengan sedikit fasilitas.

Perdagangan tenaga kerja telah meningkat karena penduduk asli Portugal telah menuai dan menurun di tengah penurunan tingkat kelahiran dan emigrasi ke negara-negara Uni Eropa utara yang lebih makmur. Faktor lain adalah depopulasi pedalaman pedesaan.

Sementara itu, ekspor pertanian telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan pertanian besar semakin membutuhkan tenaga kerja murah.

Dewan Eropa mengatakan pada Juni tahun ini, pihak berwenang Portugal mengidentifikasi 1.152 orang yang diduga sebagai korban perdagangan manusia pada 2016-2020, yang sebagian besar dieksploitasi di sektor pertanian. Jumlah investigasi, penuntutan, dan hukuman tetap rendah dibandingkan dengan jumlah korban yang teridentifikasi. ● ans

Perdagangan tenaga kerja telah meningkat karena penduduk asli Portugal telah menuai dan menurun di tengah penurunan tingkat kelahiran dan emigrasi ke negara-negara Uni Eropa utara yang lebih makmur. Faktor lain adalah depopulasi pedalaman pedesaan.

Sementara itu, ekspor pertanian telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan pertanian besar semakin membutuhkan tenaga kerja murah. Dewan Eropa mengatakan pada Juni tahun ini, pihak berwenang Portugal mengidentifikasi 1.152 orang yang diduga sebagai korban perdagangan manusia pada 2016-2020, yang sebagian besar dieksploitasi di sektor pertanian. Jumlah investigasi, penuntutan, dan hukuman tetap rendah dibandingkan dengan jumlah korban yang teridentifikasi. ● ans

Perdagangan tenaga kerja telah meningkat karena penduduk asli Portugal telah menuai dan menurun di tengah penurunan tingkat kelahiran dan emigrasi ke negara-negara Uni Eropa utara yang lebih makmur. Faktor lain adalah depopulasi pedalaman pedesaan.

Sementara itu, ekspor pertanian telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan pertanian besar semakin membutuhkan tenaga kerja murah. Dewan Eropa mengatakan pada Juni tahun ini, pihak berwenang Portugal mengidentifikasi 1.152 orang yang diduga sebagai korban perdagangan manusia pada 2016-2020, yang sebagian besar dieksploitasi di sektor pertanian. Jumlah investigasi, penuntutan, dan hukuman tetap rendah dibandingkan dengan jumlah korban yang teridentifikasi. ● ans

Perdagangan tenaga kerja telah meningkat karena penduduk asli Portugal telah menuai dan menurun di tengah penurunan tingkat kelahiran dan emigrasi ke negara-negara Uni Eropa utara yang lebih makmur. Faktor lain adalah depopulasi pedalaman pedesaan.

Sementara itu, ekspor pertanian telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan pertanian besar semakin membutuhkan tenaga kerja murah. Dewan Eropa mengatakan pada Juni tahun ini, pihak berwenang Portugal mengidentifikasi 1.152 orang yang diduga sebagai korban perdagangan manusia pada 2016-2020, yang sebagian besar dieksploitasi di sektor pertanian. Jumlah investigasi, penuntutan, dan hukuman tetap rendah dibandingkan dengan jumlah korban yang teridentifikasi. ● ans